

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM SISTEM INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Anton Robiansyah¹⁾, Ainun Srimulyani²⁾

¹ Universitas Terbuka, Indonesia

² Universitas Terbuka, Indonesia

¹anton.robiansyah@ecampus.ut.ac.id, ², ainunsrim9@gmail.com

Abstrak

Akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang dapat menjadi panutan dan ukuran dalam organisasi baik organisasi publik maupun swasta. Sistem informasi keuangan mampu menjadi ukuran seberapa baik pemerintah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Dewasa ini penerapan prinsip good governance sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi pemerintah baik di kota Metro ataupun daerah lain di Indonesia. Tujuan dalam Analisis Implementasi Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kota Metro adalah untuk, menganalisis penerapan prinsip good governance di Kota Metro dalam penyajian informasi keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mengevaluasi kondisi sebenarnya yang terdapat di kota metro serta potensi daerah. Kota metro telah menerapkan prinsip Good Governance dalam kinerjanya terutama dalam penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan pemerolehan penghargaan WTP 13 kali berturut-turut. Penerapan prinsip Good Governance pemerintahan belum menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang pejabat yang tidak bertanggungjawab. Seperti adanya indikasi dugaan korupsi anggaran rutin oleh Tiga ODP di Kota Metro.

Kata kunci: *Good Governance*, Sistem Informasi Keuangan, Otonomi Daerah

Bagian ini diisi oleh Tim Editor

Article History:	Received:2023/12/28	Revised:2023/12/31	Accepted:2023/12/31
------------------	---------------------	--------------------	---------------------

PENDAHULUAN

Kebijakan yang menjadi sangat penting di Indonesia salah satunya adalah otonomi daerah. Demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem di mana kekuasaan memiliki level pada pemerintahan mewujudkan otonomi daerah yang menuntut kemandirian dari setiap manajemen pemerintah daerah. Pemerintah pusat menentukan distribusi kewenangan pusat dan daerah baik dalam segi pengaturan daerahnya ataupun dalam kewenangan keuangan. Pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan baik secara sosial, ekonomi, dan politik, diperlukan adanya sistem atau pemerintahan yang baik agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah di mana. Pemerintah daerah mendapatkan hak dan kewenangan yang luas dalam penggunaan sumber keuangan daerahnya, yang telah disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Maka sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengurus daerahnya. Sistem informasi keuangan pemerintah daerah harus dikelola dengan tanggung jawab. Dimana laporan keuangan harus dicatat secara lengkap, cermat dan akurat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat dievaluasi kembali dalam rangka pengambilan keputusan, dan transparan. Sarwenda biduri dalam bukunya mengatakan bahwa akuntansi publik merupakan aktivitas keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan hak publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang baik oleh pemerintah. (Biduri, 2018, hal. 2).

Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan menyediakan tempat dimana masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, karena pada dasarnya laporan keuangan pemerintah juga merupakan dokumen publik. Mudah-mudahan laporan keuangan di akses akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan daerah sekaligus menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas retribusi dan pajak yang ditanggung kepada masyarakat. *Good Governance* menjadi masalah yang sering dibicarakan, karenanya masyarakat menjadi lebih kritis terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, oleh karena itu 3 pola pemerintahan yang baik telah menjadi tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah. *Good governance* atau tata kelola

pemerintah yang baik harus diterapkan dalam mencapai kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Good governance* merupakan sebuah instrumen yang mengukur kinerja dengan ada atau tidaknya transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, profesionalitas dalam melakukan kinerja. Dalam pembenahan paradigma dan ideologi yang terdapat dalam sistem pemerintahan manajemen publik memerlukan kerangka konsep *Governance* yang meliputi ‘filosofis’, ‘teoritis’ dan ‘analitis’ yang di tunjukkan untuk aspek internal dan eksternal organisasi, *output* dan *income* serta dampak dalam suatu organisasi. kerangka *Governance* ini ada dalam upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakatnya. Masalah yang dihadapi Indonesia semakin kompleks, pemerintah yang seharusnya menjadi panutan justru banyak yang terlibat masalah hukum. Fakta bahwa pemerintah yang baik di Indonesia masih menjadi mimpi belaka. Sudah saatnya Indonesia melakukan revolusi karna apa yang terlihat saat ini kebanyakan hanya demi kepentingan partai politik tidak untuk publik. Upaya dalam transparansi memanglah baik namun belum menggambarkan pemerintah yang baik. (Maryam, 2016, hal. 2) Pada 18 Mei 2013 lalu kompas.com, menerbitkan deretan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus korupsi menjadi sorotan bukan hanya karena pelakunya tapi juga karena kerugiannya. Seperti kasus yang saat ini menjadi sorotan terkait dugaan korupsi proyek *Base Transceiver Station (BTS) 4G* yang melibatkan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Jumlah kerugian di tafsir mencapai Rp 8 triliun, dengan nilai proyek Rp 10 triliun. Selain kasus BTS kasus korupsi dengan kerugian negara yang fantastis seperti: 1. Korupsi penyerobotan lahan di Riau, melibatkan PT Duta Palma Group, Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman dimana korupsi ini dilakukan dengan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau dengan kerugian negara sebesar Rp 39,7 triliun. 2. Korupsi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), yang memberikan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau setara Rp 37,8 triliun. 3. Korupsi ASABRI, yang melibatkan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero). Korupsi ini terjadi karena manajemen PT Asabri melakukan 4 pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksa dana bersama dengan pihak swasta. Dengan kerugian senilai Rp 27,7 triliun. 4. Korupsi Jiwasraya, yang melibatkan sektor asuransi yaitu PT Asuransi Jiwasraya(Persero) yang gagal membayar polis nasabah investasi Seving Plan sebesar 12,4 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai 16,8 triliun. 5. Korupsi FPJP Bank century, yang cukup mengheohkan dan kerugian bear negara senilai Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP.

Selain itu negara juga mengalami kerugian sebesar Rp 6,742 triliun terkait kebijakan Bank Century sebagai bank yang bisa berdampak sistematis. Banyaknya korupsi yang ada, mengakibatkan munculnya konsep Good Governance akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal yang dapat dilakukan guna menerapkan Good Governance di Indonesia adalah dengan penyelenggaraan pelayanan publik, yang merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah. (Maryam, 2016, hal. 2) Pemerintah daerah kota Metro sama halnya dengan daerah lainnya di mana tuntutan dalam Implementasi Good Governance harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama dalam laporan keuangan serta tanggungjawabnya terhadap pelayanan kepada publik. Kota metro sudah cukup baik dalam pelaporan keuangannya, hal ini dibuktikan dengan pemerolehan penghargaan WTP 13 kali berturut-turut dari BPK RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya Pemkot Metro berhasil menyajikan laporan keuangan yang, menyediakan secara wajar dalam semua hal yang material, seperti posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip aturan akuntansi dan prinsip umum akuntansi di Indonesia. Informasi ini dimuat pada halaman Radar Lampung pada 15 juni 2023. Kota Metro sudah menerapkan prinsip *Good Governance* terutama dalam penyajian informasi laporan keuangan. Namun prinsip *Good Governace* ini belum melekat pada setiap pejabat yang berwenang. Hal ini membuktikan meski Pemerintahan telah menjalankan prinsip *Good Governance* jika masing-masing dari anggota atau pejabatnya belum konsisten akan terjadi penyalahgunaan wewenang, baik yang sudah nampak ataupun yang sudah terendus. Berita baru-ini yang di terbitkan oleh kupastuntas.com pada Rabu, 03 Mei 2023, terkait dugaan korupsi anggaran rutin di Bumi Sai Wawai oleh Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

LANDASAN TEORI

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan yang dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mewujudkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya dapat berjalan dengan adanya otonomi daerah. Pemerintah daerah menuntut dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Suverius, dkk berpendapat bahwa Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya haruslah dijalankan sesuai dengan kewajiban, kewenangan dan jabatannya dalam pemerintahan. Kewenangan ini mencakup dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan daerah serta pertanggungjawabannya. Keuangan daerah pada dasarnya mencakup dua hak yang terdiri dari hak yang merupakan semua milik daerah yang dapat di buktikan secara hukum dan kewajiban yang merupakan kinerja pemerintah dalam tugasnya sebagai pelayan publik.

(suverius, prihat, & sumtaky, 2020, hal. 153) Adissya dan Budi berpendapat bahwa, Otonomi daerah pada dasarnya diadakan dalam upaya pembangunan daerah, kreativitas daerah dan inovasi pemerintah yang ditujukan dalam membangun kesejahteraan daerahnya. Harapan adanya otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi sektor publik di Indonesia.(Mega & Ispriyanto, 2019, hal. 150) Pemerintahan yang baik (Good Governance) dinilai sebagai paradigma baru merupakan salah satu hal yang harus ada dalam manajemen sektor publik. *Governance* secara umum diartikan sebagai hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Terdapat tiga domain dalam *governance* yaitu pemerintah (*state*), pengusaha (*privat sector*), dan masyarakat (*society*). (Abas, Farida, & Suryawan, 2021) Pemahaman Good Governancemulai terdenga sejak tahun 1990-an, yang digunakan sebagai tolak ukur oleh negara-negara pemberi bantuan atau pinjaman ataupun hibah. Pada tahun 1997 UNDP (United Nation Development Program) dalam departemen agama RI, menjelaskan bahwa *Good Governace* : “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage country’s affairs at all levels and the means by which states promote socialcohesion, integrationand ensure the well-being of the 6 population*” yang astinya pemerintahan merupakan pelaksanaan kekuasaan pada bidang ekonomi, polotik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat). (Muhammad, Akhlis, & Yaskun, 2021, hal. 55) Terdapat sembilan prinsip *Good Governance* menurut UNDP yang diharapkan mampu diterapkan pada sektor publik. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari : a. Partisipasi (setiap masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya) b. Aturan hukun (adil, pedoman, patuh) c. Transparasi (informasi keuangan dapat di aksek secara mudah oleh masyarakat) d. Responsif (melakukan pelayanan yang baik pada *steakholders*) e. Berorientasi konsensus (sebagai penengah) f. Equity atau kesetaraan dan keadilan g. Efektif dan efisien dan sesuai kebutuhan h. Akuntabilitas (memiliki tanggungjawab terhadap publik) i. Variasi strategi dengan sudut pandang luas. Dengan tujuan mencapai keseimbangan dalam optimalisasi implementasi administrasi masyarakat dengan sektor non publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif . metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis kondisi sosial yang akan di analisis secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode kualitatif juga digunakan untuk memperoleh penjelasan terkait aspek-aspek yang ada baik pada individu ataupun organisasi, masyarakat dalam mengkaji suatu masalah atau bahasan tertentu dengtan sudut pandang yang dapat dilihat secara menyeluruh , mendalam. Metode kualitatif mengamati fenomena dan substansi makna dari kasus atau kajian yang akan diteliti. Menurut sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif menggunakan dasar filsafat dalam penelitian ilmiah. Analisis dengan menggunakan metode kualitatif lebih menekankan kepada makna, dengan maksud memahami peristiwa dan fenomena yang terjadi pada objek yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas, pemerintah pusat membuat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan maka diperlukan adanya peraturan tentang sistem informasi keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan ini dibuat dengan harapan pemerintah daerah mampu menjadi lebih baik dengan mewujudkan akuntabilitas. Provinsi Lampung diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Otonomi daerah yang di tujukkan sebagai kerangka kebijakan dalam mewujudkan percepatan kemandirian daerah masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pejabat-pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang, kompas.com pada 16 April 2023 lalu dalam “Lampung Dan Jerat Korupsi Kepala Daerahnya” memuat adanya beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi seperti, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama tiga orang lainnya. Dalam OTT tersebut KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp 600 juta. Ia pun dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan, setelah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 100 miliar. selain bupati Lampung Utara, Bupati Mesuji Khamimi pun terkena OTT KPK beserta 10 orang lainnya pada januari 2019 lalu, dalam OTT tersebut KPK berhasil mengamankan bukti senilai Rp 1,28 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu dalam kardus kemasan air mineral. Ia pun divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan, dan masih ada 5 kepala daerah lainnya di Lampung yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menandakan masih banyak aparat atau pejabat yang belum menerapkan prinsip *Good Governance* pada pemerintahannya. Provinsi Lampung mendapat banyak sorotan setelah kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo pada 5 Mei 2023, hal ini karena banyaknya jalan yang rusak parah. Jalan rusak sudah menjadi masalah yang kompleks di Lampung bahkan untuk waktu yang lama. Hal ini menjadi masalah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pada halaman Presiden RI pada jumat, 5 Mei 2023, dalam keterangannya di pusat perbelanjaan 8 Sarinah, Jakarta Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur jalan sangat penting karena akan mendukung arus mobilitas orang maupun barang. “Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik sehingga barang tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain,” jelas Presiden. Kota Metro menjadi salah satu daerah di provinsi Lampung dengan julukan kota pendidikan. Tindak penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pun terjadi di kota Metro seperti, yang diliput pada kupastuntas.com pada 20 Mei 2022 lalu terkait dugaan korupsi anggaran peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan saat menjabat sebagai kepala DLH Metro oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro. Namun Kota Metro termasuk sebagai daerah unggulan di Lampung. Kota Metro

memperoleh penghargaan sebagai kota terbaik di Provinsi Lampung. Hal ini diterbitkan pada Radarmetro.co.id pada 29 maret 2023. Kota Metro meraih penghargaan tingkat Provinsi atas pembangunan Sai Bumi Ruwai Jurai. Penghargaan diberikan karena Kota Metro sebagai kota terbaik dalam perencanaan dan pembangunan daerah tahun 2023. Selain itu kota metro juga mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut. Hal ini membuktikan penerapan prinsip *Good Governance* Kota Metro sudah terlaksana dan telah di terapkan, meskipun tidak lepas dari pejabat atau aparat yang tidak bertanggungjawab. *Good Governance* diukur dari kepuasan berdasarkan pada implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah dan kepuasan dari masyarakatnya sendiri terkait kinerja dalam melakukan pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Kota Metro merupakan daerah yang berada di provinsi Lampung, terletak sekitar 52 km dari kota Bandar Lampung, dan menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro mendapat julukan sebagai kota pendidikan di Lampung. Nama Metro sendiri berasal dari bahasa Belanda “meterm” yang artinya “pusat” karna berada di tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan berada di pusat Provinsi Lampung. Kota Metro sebagai kota pendidikan kini sedang giat dalam memajukan daerahnya, dengan melakukan 9 pembangunan kota dengan memperbaiki sektor pendidikan, kebersihan, keamanan dan peningkatan fasilitas publik. dengan predikat sebagai salah satu kota terbesar di Lampung dan merupakan tempat strategis untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pemerintah kota Metro yang terkenal sebagai kota pendidikan di Lampung memiliki keunggulan dalam pelayanan publik, minimnya tindak kecurangan atau pungli yang ada dalam pelayanan publik seperti pada pembuatan KTP, KK, SIM, atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh warganya. Pemerintah kota Metro sebagai salah satu daerah dengan pelayanan publik terbaik yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan pelayanan publik oleh KEMENPAN RB pada tahun 2019. Dalam penyajian informasi keuangan pemerintah kota Metro melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Dengan menyampaikan informasi keuangan daerahnya kepada BPK dan memperoleh penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 13 kali berturut-turut dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kota Metro telah menyampaikan dan mengomunikasikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Dengan adanya penghargaan WTP ini Pemerintah Kota Metro membuktikan bahwa laporan keuangan yang tersaji telah memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah kota Metro kepada pemerintah pusat meliputi : 1. Laporan neraca daerah kota Metro 2. Laporan arus kas daerah kota Metro 3. APBD kota Metro 4. Laporan perusahaan daerah kota

Metro 5. Catatan atas laporan keuangan daerah kota Metro 6. Dana dekonsentrasi dan tugas bantuan 7. Kebutuhan fiskal berupa data pemerintah daerah kota Metro Sistem Informasi Keuangan (SIKD) kota Metro cukup mudah diakses. SIKD dimaksudkan membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah, laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan serta membantu kepala daerah beserta instansinya dalam evaluasi kinerja. Selain berguna untuk pemerintahan SIKD juga berguna dalam kebutuhan statistika keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan 10 daerah kepada masyarakat secara terbuka. Contoh SIKD kota Metro yang diakses pada halaman djp.kemenkeu.go.id adalah :

Akron	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	843,83 M	869,32	102,83
PAD	226,32 M	239,93	105,98
Pajak Daerah	32,01 M	36,71 M	114,70
Retribusi Daerah	9,10 M	7,10 M	77,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,34 M	6,73 M	91,54
Lain-Lain PAD yang Sah	177,78 M	189,18 M	106,42
TKDD (*)	599,52 M	582,83	97,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	536,22 M	562,01 M	104,82
Pendapatan Lainnya	56,27 M	65,22 M	115,89
Pendapatan Transfer Antar Daerah	56,17 M	63,69 M	113,37
Pendapatan Hibah	0,00 M	0,14 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Daerah	576,88 M	538,38	93,16
Belanja Pegawai	437,93 M	426,09	97,06
Belanja Pegawai	437,93 M	426,09 M	97,06
Belanja Barang Jasa	327,17 M	343,07	104,84
Belanja Barang dan Jasa	327,17 M	343,07 M	104,84
Belanja Modal	65,28 M	62,43 M	95,63
Belanja Modal	65,28 M	62,43 M	95,63
Belanja Lainnya	44,32 M	44,96 M	101,42
Belanja Subsidi	0,00 M	0,76 M	0
Belanja Hibah	35,17 M	46,23 M	131,67
Belanja Bantuan Sosial	6,25 M	0,19 M	30,88
Belanja Tidak Terbagi	7,30 M	7,14 M	97,81
Belanja Bantuan Keuangan	1,30 M	0,60 M	46,15
Surplus ((Defisit))	-92,85 M	-93,24 M	100,39
Pembayaran Daerah	92,85 M	86,97 M	93,66
Pemenuhan Pembiayaan Daerah	34,85 M	36,97 M	106,08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	34,85 M	36,97 M	106,08
Pemenuhan Kembali Pembiayaan Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penghasilan Pembiayaan Daerah	2,00 M	0,00 M	0,00
Penghasilan Modal Daerah	2,00 M	0,00 M	0,00

Sumber: Sistem informasi Keuangan Daerah, postur APBD kota Metro, pada djp.kemenkeu.go.id

Good governance pada dasarnya mengandung 2 pemahaman: 11 a. Pemerintah fungsional efektif dan efisien dalam kinerja b. Menjunjung tinggi nilai dan keinginan masyarakat dalam pembangunan, kemandirian, dan keadilan dalam mencapai tujuan nasional. SIKD menjadi solusi dalam mewujudkan transparansi keterbukaan dan pertanggungjawaban aktivitas keuangan daerah. Berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) laporan keuangan memuat informasi yang disajikan dengan maksud memenuhi kebutuhan *Stakeholders*. Di era di mana masyarakat mampu menyuarakan pendapatnya secara bebas, masyarakat mulai kritis dan menyorot pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena banyaknya kasus

korupsi yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah yang ada. BPK baru-baru ini mengemukakan 105 dari 467 laporan keuangan pemerintah daerah tidak atau belum diperiksa, karena dinilai belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Metro bukan menjadi salah satu dari 105 daerah yang disebut oleh. Pemerintah kota metro dinilai telah mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Hal ini menunjukkan sistem akuntansi pemerintah kota Metro berjalan dengan semestinya. Dengan informasi yang tersaji dapat dilihat bahwa pemerintah kota Metro telah menjalankan komitmen dalam membangun daerahnya yang menandakan pemerintah kota Metro telah berjalan cukup baik dan telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* meskipun belum berjalan secara merata atau menyeluruh. Seperti berita yang baru-baru ini beredar terkait indikasi dugaan korupsi anggaran rutin oleh opd yang sedang diperiksa oleh Kejati dan masih banyaknya kegiatan nepotisme di kota Metro. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meminimalkan kerugian negara oleh orang dengan kepentingan pribadi dan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyajikan secara komprehensif laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 agar dapat menjadi pedoman dan membantu pemerintah daerah dalam akuntabilitas yang memenuhi aspek lengkap, tepat, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah kota metro telah menerapkan prinsip *goodgovernance* dengan cukup baik pada kinerjanya terutama dalam penyajian sistem informasi keuangan dan laporan keuangan yang telah berjalan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan pemerolahan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian 13 kali berturut-turut yang di berikan oleh BPK. Sistem informasi keuangan pemerintah kota Metro telah berjalan secara efektif dan efisien yang menjadi daya dorong kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah sebagai pemerintah yang baik. Meskipun masih ada pihak atau pejabat yang menyalahi wewenang dengan bertindak tidak bertanggungjawab, seperti korupsi. *Good Governance* dalam penerapan prinsip-prinsipnya Kota Metro telah diterapkan dan cukup berdampak pada kinerja Pemerintah Kota Metro. Selain pada sistem informasi laporan keuangan, laporan keuangan yang memperoleh penghargaan WTP, pemerintah kota metro juga mampu dalam pembangunan kota. hal ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai kota terbaik Provinsi Lampung Pemerintah Kota metro, dinilai mampu dalam perencanaan dan

pembangunan daerahnya. Pemerintah yang baik masih menjadi tugas besar yang perlu di terapkan, baik di Kota Metro, Provinsi Lampung bahkan seluruh Indonesia. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik sangat diperlukan bukan hanya untuk rakyat tapi juga untuk pembangunan bangsa.

SARAN

Pemerintahan baik di kota Metro ataupun daerah lain di Indonesia diharapkan mampu menekankan kesadaran terhadap setiap individu pejabat, bahwasanya sebagai seseorang yang diberikan wewenang dan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola daerah hendaknya lebih bertanggungjawab akan kinerjanya. Di daerah kota Metro penerapan 13 Good Governance sudah terbilang baik terutama dalam sistem informasi keuangan dan penyajian laporan keuangan. Pengadaan pelatihan dan pengawasan rutin diperlukan dalam penerapan prinsip good governance, karena prinsip ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya kesadaran setiap pejabat dan kerjasama dari semua pihak. Selain itu jika sitem informasi keuangan lebih transparan dan terselenggara dengan baik, sitem ini dapat menjadi dorongan sebagai pemerintah yang baik, diharapkan pada masa mendatang penerapan sistem good governance ini dapat terselenggara dengan lebih efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa. Bagi peneliti selanjutnya , saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber sumber dalam mencari informasi laporan keuangan dan penerapan prinsip Good Governace sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas lagi tidak hanya pada Kota Metro saja tapi juga daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A., Farida, I., & Suryawan, D. (2021). Implementasi Good Governace Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi Covid-19 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro. *ubl.ac.id* , 8.
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: UMSIDA Press .
- diskominfo, t. (2023, februari 06). selama 25 hari tim BPK perwakilan provinsi lampung akan periksa LKPD pemerintah kota metro. Dipetik juni 03, 2023, dari [info.metrokota.go.id: https://info.metrokota.go.id/selama-25-hari-tim-bpk-perwakilan provinsi-lampung-akan-periksa-lkpd-pemerintah-kota-metro/](https://info.metrokota.go.id/info/metrokota.go.id/selama-25-hari-tim-bpk-perwakilan-provinsi-lampung-akan-periksa-lkpd-pemerintah-kota-metro/)
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *unisba.ac.id* , 201.
- lampung, M. k. (2019, november 25). kota metro kembali raih penghargaan pelayanan publik dari kemenpan rb. Dipetik juni 01, 2023, dari [infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/nusantara/388471/kota-metro-kembali-raih-penghargaan-pelayanan-publik-dari-kemenpan-rb](https://infopublik.id/kategori/nusantara/388471/kota-metro-kembali-raih-penghargaan-pelayanan-publik-dari-kemenpan-rb)

- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. repository.unicom.ac.id , 2.
- Mega, A., & Ispriyanto, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. academia.edu , 150.
- monica, a. c. (2022, Februari 06). prinsip-prinsip good governance menurut UNDP. Dipetik juni 04, 2023, dari [kompas.com: https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-raih-wtp-ke-13-berturut-turut/](https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-raih-wtp-ke-13-berturut-turut/)
- Muhammad, I. S., Akhlis, P. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerimaan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. rcipublisher.org , 49-58.
- POSTUR APBD KOTA METRO. (2022, desember 01). Dipetik juni 04, 2023, dari djp.kemenkeu.go.id:
<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=08&pemda=10>
- pratama, a. (2023, mei 03). soal dugaan korupsi anggaran rutin, kejar mulai periksa tiga ODP di metro lampung. Dipetik juni 04, 2023, dari kupastuntas.com: 15
<https://www.kupastuntas.co/2023/05/03/soal-dugaan-korupsi-anggaran-rutin-kejar-mulai-periksa-tiga-opd-di-metro-lampung>
- Putrantohutomo, A. (2023, mei 18). deretan korupsi terbesar di Indonesia: kasus surya darmadi sampai BTS 4G. Dipetik juni 15, 2023, dari kompas.com:
<http://www.google.com/amp/s/amp/kompas.com/nasional/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g>
- Rasul, S. (2009). penerapan good governance di Indonesia dalam Upaya pencegahan tindak pidana korupsi. ugm.ac.id , 539.
- ri, p. (2023, mei 5). ajangkarya ke Lampung Presiden akan tinjau pasar dan sejumlah ruas jalan. Dipetik juni 15, 2023, dari presidenri.go.id:
<http://www.google.com/amp/s/www.presidentri.go.id/siaran-pers/ajangkarya-ke-lampung-presiden-akan-tinjau-pasar-dan-sejumlah-ruas-jalan/amp>
- setiauntari, r., & satriadi, a. (2023, mei 19). pemkot metro pertahankan capaian penghargaan WTP ke-13 kalinya secara berturut-turut. Dipetik juni 15, 2023, dari radarlampung.disway.id:
<http://radarlampung.disway.id/read/668061/pemkot-metro-pertahankan-capaian-penghargaan-wtp-ke-13-kalinya-secara-berturut-turut>
- Suparji. (2019). implementasi prnsip good governance dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. jurnal.uai.ac.id , 3.
- suverius, d. m., prihat, a., & sumtaky, m. (2020). pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja perangkat daerah. archive.org , 153.
- tim. (2023, mei 03). pemkot metro raih WTP ke-13 berturut turut. Dipetik juni 01, 2023, dari info.metrokota.go.id: <http://info.metrokota.gi.id>
- wahyuningsih, d. (2021). mengenal kota metro sebagai bumi sai wawai. Diambil kembali dari djkn.kemenkeu.go.id:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13302/Mengenal-Kota-Metro-Sebagai-Bumi-Sai-Wawai.htm>